



ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ATP DAN WTP PESERTA MANDIRI DALAM MEMBAYAR IURAN BPJS KELAS III PADA PEDAGANG DI KELURAHAN TUNTUNGAN II

ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED WITH ATP AND WTP OF INDEPENDENT PARTICIPANTS IN PAYING THIRD CLASS BPJS CONTRIBUTIONS AMONG TRADERS IN TUNTUNGAN II VILLAGE

Luthfiah Khumaira*¹, Putri Herawati², Shopiah Auzi³, Fitriani Pramita Gurning⁴

Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara
Email : luthfiahkhumaira@gmail.com, 082370763846

ABSTRAK

Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) per tahun 2022 sebesar 12,4% atau sekitar 34.144.797 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 95,7% dari total penduduk Indonesia, dimana 130,21 juta jiwa (48,3%) diantaranya termasuk dalam segmen peserta mandiri. ATP dan WTP merupakan faktor kunci dalam keputusan peserta untuk membayar iuran JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan (ATP) dan kemauan (WTP) membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III mandiri pada pedagang di Kelurahan Tuntungan II. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang berprofesi sebagai pedagang di Kelurahan Tuntungan II, sampel yang diambil sebanyak 85 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang memiliki kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS kelas III yang cukup tinggi, meskipun ada yang merasa tidak mampu membayar karena prioritas kebutuhan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan (ATP) dan Kemauan (WTP) pedagang di Kelurahan Tuntungan II adalah pendidikan terakhir yang memiliki pengaruh terhadap Kemampuan (ATP) dengan nilai p-value sebesar 0,005. dan Jumlah Pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap Kemampuan (ATP) dengan nilai p-value sebesar 0,035. Sedangkan faktor jumlah anggota keluarga memiliki nilai p-value sebesar 0,241 > 0,05 yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap Ability (ATP). Namun, ketiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap Kemauan (WTP).

Kata kunci: BPJS Mandiri, Faktor ATP dan WTP, Pedagang

ABSTRACT

BPJS Health membership coverage in Indonesia for Non-Wage Earning Workers (PBPU) as of 2022 is 12.4%, around 34,144,797 people. By 2024 the number of BPJS Health participants has reached 95.7% of the total population of Indonesia, of which 130.21 million (48.3%) are included in the independent participant segment. ATP and WTP are key factors in participants' decisions to pay JKN contributions. This research aims to determine the ability (ATP) and willingness (WTP) to pay independent BPJS Health Class III contributions to traders in Tuntungan II Village. This research method uses descriptive quantitative research with a cross sectional design. The population in this study were all Non-Wage Earning Workers (PBPU) who worked as traders in Tuntungan II Village, the sample taken was 85 people. The research results show that the majority of traders have the ability and willingness to pay quite



high class III BPJS contributions, although some feel they are unable to pay because of the priority of family needs. The factors that influence the Ability (ATP) and Willingness (WTP) of traders in Tuntungan II Village are the latest education which has an influence on Ability (ATP) with a p-value of 0.005. and Total Income also has an influence on Ability (ATP) with a p-value of 0.035. Meanwhile, the factor number of family members has a p-value of $0.241 > 0.05$, which means it has no influence on ability (ATP). However, these three factors have no influence on Willingness (WTP).

Keywords: *BPJS Independent, ATP and WTP Factors, Traders*

PENDAHULUAN

Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) per tahun 2022 sebesar 12,4% atau sekitar 34.144.797 jiwa (LPKK, 2022). Program BPJS Kesehatan telah menjangkau porsi dominan masyarakat, mencapai 95,7% di tahun 2024, yaitu 130,21 juta jiwa (48,3%) termasuk mereka yang menanggung iuran sendiri. Sisanya memiliki kartu JKN-KIS PBI menjadi bagian dengan persentase terbesar yaitu 51,7% dari total jumlah peserta BPJS Kesehatan (DJSN, 2024).

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan Non PBI di Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 25,62% atau sekitar 3.872.515 jiwa. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, penduduk golongan Pekerja Bukan Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2023 adalah 457.846 jiwa (Dinkes Pemkot Medan, 2023).

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Di Indonesia, sistem jaminan kesehatan nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan Sejak diresmikannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2004. JKN adalah program asuransi kesehatan universal yang Dibuat untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan murah (Sudarman et al., 2021).

Salah satu kategori Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) adalah individu yang bekerja secara mandiri sebagai pedagang dan menghasilkan uang dari usaha dagang pribadi mereka. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, mereka diwajibkan membayar iuran bulanan (Sudarman et al., 2021). ATP dan WTP

merupakan faktor kunci dalam keputusan peserta untuk membayar iuran JKN. ATP mengacu pada kemampuan finansial seseorang untuk menanggung biaya premi asuransi kesehatan, sedangkan WTP mencerminkan seberapa besar keinginan seseorang untuk membayar iuran tersebut. Dalam konteks kepesertaan JKN, ATP dan WTP berperan penting dalam menentukan keikutsertaan peserta, tingkat kepatuhan membayar iuran, dan pada akhirnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang diterima (Agustina et al., 2021).

Kemampuan membayar anggaran asuransi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Situasi ekonomi dan kebutuhan anggota keluarga berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran (ATP) (Dewiyani et al., 2022). Setiap individu berbeda, ada yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi untuk membayar iuran namun enggan melakukannya, yang mengindikasikan kesediaan untuk membayar kurang dari kemampuan mereka. Bersamaan dengan itu, ada pula individu yang memiliki kemampuan finansial yang terbatas namun secara teratur membayar iuran kesehatan, yang mengindikasikan bahwa mereka cenderung membayar lebih banyak dari yang mereka mampu (Rusydi et al., 2022). Mengukur potensi dan minat masyarakat untuk membayar premi asuransi kesehatan menjadi elemen fundamental dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam program asuransi kesehatan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan ATP dan WTP dalam konteks kepesertaan JKN. Salah satu studi menunjukkan bahwa ketersediaan untuk membiayai iuran sangat



dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan dalam keluarga (Darmawati & Prakoso, 2023). Sementara itu, kemauan untuk membayar iuran terkait dengan persepsi terhadap manfaat layanan kesehatan dan kualitas layanan yang diterima.

Dalam konteks kepesertaan JKN, pemahaman yang mendalam mengenai ATP dan WTP sangat penting dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kepesertaan, menjamin keberlanjutan program, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Mengingat hal tersebut, peneliti berminat untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi ATP dan WTP peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam membayarkan iuran mereka kelas III pada pedagang di Desa Tuntungan II

BAHAN DAN METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan populasi seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang berprofesi sebagai pedagang yang berjumlah 572 orang, dan sampel yang dibuat dengan rumus slovin berjumlah 85 orang. Untuk menjangkau data dari pedagang kaki lima atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III di Desa Tuntungan II, penelitian ini menggunakan metode sampling non-probabilitas dengan teknik Accidental Sampling. Data didapat dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan informasi jumlah pedagang diperoleh dari Kantor Lurah Tuntungan II. Data diolah pakai SPSS, dimulai dengan Uji Univariat untuk melihat frekuensi dan persentase ciri-ciri responden. Lalu, Uji Bivariat dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

HASIL

Univariat

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden Pedagang (PBPU) Sebagai Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan Kelas III di Desa Tuntungan II

Karakteristik	Frekuensi	Persentase(%)
Pendidikan		
SD	5	5,9%
SMP	19	22,4%
SMA	43	50,6%
Perguruan Tinggi	18	21,2%
Jumlah Anggota Keluarga		
2	6	7,1%
3-5	75	88,2%
6	4	4,7%
Pendapatan		
<3.700.000	62	72,9%
>3.700.000	23	27,1%
Kemauan (WTP)		
Mau	79	92,2%

Tidak Mau	6	7,1%
Kemampuan (ATP)		
Mampu	55	64,7%
Tidak Mampu	30	35,3%

Dari tabel 1. di atas diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA sebanyak 43 orang (50,6%), dan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan SD yang hanya 5 orang (5,97%). Berdasarkan jumlah anggota keluarga, mayoritas responden yang memiliki anggota keluarga berjumlah 3-5 orang sebanyak 75 orang (88,2%). Sementara itu, hanya 4 orang (4,7%) responden yang memiliki jumlah anggota keluarga 6 orang. Berdasarkan pendapatan keluarga, sebagian besar masyarakat Desa Tuntungan II memiliki pendapatan <3.700.000

(Rendah) sebanyak 62 orang (72,9%). Sementara itu, hanya 23 orang (27,1%) yang memiliki penghasilan >3.700.000 (Tinggi). Berdasarkan kemauan membayar, mayoritas responden Desa Tuntungan II mau bayar iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 Mandiri sebanyak 79 orang (92,9%). Sedangkan yang tidak bersedia hanya sebanyak 6 orang (7,1%). Berdasarkan kemampuan membayar, mayoritas responden Desa Tuntungan II mampu membayar iuran BPJS Kelas 3 sebanyak 55 orang (64,7%). Sedangkan yang tidak mampu hanya 30 orang (35,3%).

Bivariat

Tabel 2. Hubungan Variabel Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga dan Jumlah Pendapatan Terhadap Kemampuan (ATP) di Desa Tuntungan II

Variabel	Kemampuan Membayar (ATP)		Total	p-value
	Mampu	Tidak Mampu		
	Frekuensi (%)	Frekuensi (%)	Frekuensi (%)	
Pendidikan				
SD	3 (3,5%)	2 (2,4%)	5 (5,9%)	0,005
SMP	6 (7,0%)	13 (15,3%)	19 (22,3%)	
SMA	31 (36,5%)	12 (14,1%)	43 (50,6%)	
PT	15 (17,7%)	3 (3,5%)	18 (21,2%)	
Jumlah Anggota Keluarga				
2	3 (3,5%)	3 (3,5%)	6 (7,0%)	0,241
3-5	50 (58,8%)	25 (29,4%)	75 (88,2%)	
6	2 (2,4%)	2 (2,4%)	4 (4,8%)	
Jumlah Pendapatan				
<3.700.000	36	26	62	0,035



(Rendah)	(42,3%)	(30,6%)	(72,9%)
>3.700.000	19	4	23
(Tinggi)	(22,3%)	(4,8%)	(27,1%)

Dari Tabel 2, hasil analisis hubungan antara dua variabel dengan uji chi-square hubungan antara pendidikan terakhir responden dengan kemampuan membayar (ATP) iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II didapatkan bahwa dari 5 responden yang berpendidikan SD sebanyak 3 orang (3,5%) mampu membayar, sedangkan yang tidak mampu membayar sebanyak 2 orang (2,4%). Dari 19 responden berpendidikan SMP, 6 orang (7%) mampu membayar, sedangkan 13 orang (15,3%) tidak mampu membayar. Dari 43 responden dengan pendidikan terakhir SMA, 31 orang (36,5%) mampu membayar, sedangkan 12 orang (14,1%) tidak mampu membayar. Dari 18 responden dengan pendidikan perguruan tinggi, 15 orang (17,7%) mampu membayar, sedangkan 3 orang (3,5%) tidak mampu membayar. Dengan nilai p-value sebesar $0,005 < 0,05$ menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan membayar (ATP) iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II.

Terungkap dari analisis bahwa terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kemampuan membayar (ATP) iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II, hal ini menunjukkan bahwa dari 6 responden dengan jumlah anggota keluarga 2 orang,

sebanyak 3 orang (3,5%) mampu membayar, sedangkan 3 orang (3,5%) tidak mampu membayar. Dari 75 responden mencakup 50 orang dengan 3-5 anggota keluarga di setiap rumah tangga (58,8%) mampu membayar, sedangkan 25 orang (29,4%) tidak mampu membayar. Dari 4 responden dengan jumlah anggota keluarga 6 orang, 2 orang (2,4%) mampu membayar, sedangkan 2 orang (2,4%) tidak mampu membayar. Hasil ini menunjukkan tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jumlah anggota keluarga dengan kemampuan membayar, dengan nilai p-value 0,241 yang lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan tingkat pendapatan Analisis menunjukkan bahwa 36 dari 62 pedagang berpenghasilan rendah di Desa Tuntungan II mampu membayar iuran BPJS kelas 3 (42,3%) mampu membayar dan 26 orang (30,6%) tidak mampu membayar. Dari 23 responden yang berpenghasilan tinggi, 19 orang (22,3%) mampu membayar, sedangkan 4 orang (4,8%) tidak mampu membayar. Dengan nilai p-value sebesar $0,035 < 0,05$, maka terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pendapatan dengan kemampuan membayar (ATP) iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II.

Tabel 3. Hubungan Variabel Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga dan Jumlah Pendapatan Terhadap Kemauan (WTP) di Desa Tuntungan II

Variabel	Kemauan Membayar (WTP)			p-value
	Mau	Tidak Mau	Total	
	Frekuensi (%)	Frekuensi (%)	Frekuensi (%)	
Pendidikan				
SD	4 (4,7%)	1 (1,2%)	5 (5,9%)	0,698
SMP	18 (21,1%)	1 (1,2%)	19 (22,3%)	
SMA	40 (47,1%)	3 (3,5%)	43 (50,6%)	
PT	17 (20%)	1 (1,2%)	18 (21,2%)	
Jumlah Anggota Keluarga				
2	5 (5,8%)	1 (1,2%)	6 (7,0%)	0,349
3-5	70 (82,4%)	5 (5,9%)	75 (88,2%)	
6	4 (4,7%)	- (0%)	4 (4,8%)	
Jumlah Pendapatan				
<3.700.000 (Rendah)	57 (67,0%)	5 (5,9%)	62 (72,9%)	0,552
>3.700.000 (Tinggi)	22 (25,9%)	1 (1,2%)	23 (27,1%)	

Berdasarkan Tabel 3. Korelasi antara pendidikan dan kemauan membayar (WTP) iuran BPJS kelas 3 di Desa Tuntungan II menunjukkan bahwa dari 5 responden yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang (4,7%) bersedia membayar, sedangkan 1 orang (1,2%) tidak bersedia membayar. Dari 19 responden berpendidikan SMP, 18 orang (21,1%) bersedia membayar, sedangkan 1 orang (1,2%) tidak bersedia membayar. Dari 43 responden berpendidikan SMA, 40 orang (47,1%) bersedia membayar, sedangkan 3 orang (3,5%) tidak bersedia membayar. Dari 18 responden

berpendidikan perguruan tinggi, 17 orang (20%) bersedia membayar, sedangkan 1 orang (1,2%) tidak bersedia membayar. Namun, dari hasil uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,698 > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kemauan membayar iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II.

Berdasarkan hubungan antara komposisi keluarga dengan kemampuan finansial (WTP) menunjukkan bahwa dari 6 responden dengan jumlah anggota keluarga 2 orang, sebanyak 5 orang (5,8%) bersedia membayar dan 1 orang



(1,2%) tidak bersedia membayar. Dari 75 responden dengan jumlah anggota keluarga 3-5 orang, sebanyak 70 orang (82,4%) bersedia membayar, sedangkan 5 orang (5,9%) tidak bersedia membayar. Dan dari 4 responden dengan jumlah anggota keluarga 6 orang, 4 orang (4,7%) bersedia membayar. Namun, hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar $0,349 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anggota keluarga dengan kemauan membayar iuran BPJS kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II.

Berdasarkan hubungan antara pendapatan dengan kemauan membayar (WTP)

PEMBAHASAN

Keterlibatan masyarakat dalam membayar premi asuransi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP). Faktor ATP dan WTP ini memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang akan ikut program kesehatan (B et al., 2021)..

Kemampuan membayar (ATP) membuktikan bahwa mayoritas pedagang di Desa Tuntungan II memiliki kemampuan membayar yang cukup tinggi yaitu sebanyak 64,7%. Tingginya kemampuan membayar iuran BPJS kelas 3 di kalangan pedagang didukung oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Namun, pendapatan yang rendah membuat beberapa pedagang merasa tidak mampu membayar iuran karena lebih mengutamakan kebutuhan keluarga (Hardy & Yudha, 2018). Data menunjukkan bahwa Mudayana dalam (Syakhila et al., 2021) yang membuktikan penghasilan keluarga berpengaruh terhadap kemampuan pasien dalam membayar tagihan medis diterima. Ketika pendapatan pasien tidak mencukupi, mereka merasa tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar layanan tersebut (Aisyah, 2022).

Kemauan membayar (WTP) pedagang di Desa Tuntungan II juga memiliki tingkat kemauan yang sangat tinggi yaitu sekitar 92,2%.

menunjukkan bahwa dari 62 responden dengan pendapatan rendah ($<3.700.000$), sebanyak 57 orang (67,0%) bersedia membayar dan 5 orang (5,9%) tidak bersedia membayar. Sementara itu, dari 23 responden dengan penghasilan tinggi ($>3.700.000$), sebanyak 22 orang (25,9%) bersedia membayar, sedangkan 1 orang (1,2%) tidak bersedia membayar. Namun Temuan penelitian menunjukkan nilai p-value 0,552 yang tidak memenuhi kriteria signifikansi, sehingga tidak ada hubungan kuat antara pendapatan dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 pada pedagang di Desa Tuntungan II.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden bersedia membayar iuran BPJS karena kesadaran mereka akan pentingnya pelayanan kesehatan bagi keluarga mereka. Kesediaan membayar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman akan pentingnya menjaga kesehatan, tingkat risiko penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan manfaat yang diperoleh dari JKN merupakan beberapa hal yang mempengaruhi pilihan seseorang dalam menentukan kelas perawatan JKN (Prakoso & Sudasman, 2020).

Penelitian terhadap pedagang di Desa Tuntungan II ini menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dengan kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan (ATP) responden, dengan nilai p-value sebesar 0,005. Tingkat kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS kelas III oleh para pedagang dari segi pendidikan masih tergolong rendah. Penelitian yang dilakukan (Marzuki et al., 2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemampuan finansial individu ketika bayar BPJS Kesehatan.

Pendidikan yang lebih baik biasanya memberikan peningkatan pekerjaan yang lebih memuaskan, gaji yang lebih besar secara otomatis meningkatkan kemampuan finansial



individu untuk memenuhi kewajiban terkait iuran biaya kesehatan. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin akan lebih kritis terhadap kualitas layanan kesehatan yang diterima, yang dapat mempengaruhi kemauan mereka untuk membayar (Fardiansyah et al., 2021; Mekarisce et al., 2022). Penelitian (Ogundeji et al., 2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kemauan dan kemampuan finansial masyarakat Nigeria untuk membayar asuransi kesehatan sosial. Kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan tinggal di kota cenderung lebih siap untuk membayar premi asuransi kesehatan dalam jumlah yang lebih besar. Temuan ini juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran JKN, yang berarti kesanggupan peserta untuk tanggung iuran JKN meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan mereka (Basaza et al., 2019; Sartika & Putra, 2024). Orang yang sekolah tinggi biasanya lebih paham dan tahu banyak tentang asuransi kesehatan, terutama JKN Mandiri.

Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan Ternyata pendidikan tinggi tidak selalu membuat orang lebih mau membayar untuk layanan kesehatan, karena mereka lebih banyak mikir risikonya daripada manfaatnya (Atriyani et al., 2019).

Lebih banyak anggota keluarga, lebih banyak orang yang sakit, dan lebih mahal biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Hal ini secara otomatis meningkatkan jumlah dana dari pendapatan bulanan keluarga yang harus dialokasikan untuk kebutuhan Kesehatan (Istamayu et al., 2022). Mayoritas responden memiliki jumlah anggota keluarga 3-5 orang dimana kemampuan membayar (ATP) sebesar 58,8% dan kemauan (WTP) sebesar 82,4%. Menurut penelitian ini menemukan bahwa jumlah anggota keluarga tidak penting untuk variabel yang diteliti dengan kemampuan membayar (p-value 0,241) dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan (p-value

0,349). Serupa dengan penelitian (Istamayu et al., 2022) menemukan bahwa jumlah anggota keluarga tidak menentukan apakah orang mau/tidak mau bayar iuran JKN. bagi peserta mandiri di Kota Jambi (p value $0,822 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota keluarga banyak, tidak selalu mempengaruhi kemampuan atau kemauan membayar iuran. Hal ini berbeda dengan penelitian (Dewiyani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap kemampuan membayar. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Murniasih et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga itu punya peran besar dalam potensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban iuran, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga dengan jumlah anggota yang lebih banyak lebih rentan mengalami kendala keuangan dalam memenuhi kewajiban iuran BPJS di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu (p value $0,006 < 0,05$)

Melalui peraturan gubernur Sumut tentang penetapan UMK di Sumatera Utara tahun 2024 menetapkan UMK Kota Medan sebesar Rp3.769.08224 (Disnaker, 2023). Sebagai pedagang, tentunya banyak dari mereka yang berpenghasilan di bawah UMK tersebut karena penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Namun, para pedagang di Desa Tuntungan II membuktikan bahwa dengan penghasilan di bawah UMK Kota Medan, mereka memiliki kemampuan dan keinginan yang lebih besar untuk membayar iuran BPJS kelas 3 dibandingkan dengan pedagang yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi atau di atas UMK Kota Medan. Secara statistik, tidak ada hubungan yang pasti antara pendapatan dan keinginan untuk membayar iuran (p-value 0,552), meskipun ada hubungan yang kuat antara pendapatan dan kemampuan untuk membayar iuran (p-value 0,035). Penelitian (Agustina et al., 2021; Wahyuni & Widodo, 2021) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor kunci dalam ATP, tetapi



kemauan untuk membayar lebih dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kualitas layanan kesehatan. Penelitian (Sudarman et al., 2021) juga menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan ATP iuran BPJS, tetapi WTP sangat tergantung pada pengalaman dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh BPJS kesehatan. Pendapatan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran individu untuk memiliki asuransi kesehatan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, seseorang cenderung lebih sadar akan pentingnya asuransi dan lebih mampu membayar premi atau iuran secara teratur (Surya & Kur'aini, 2022)..

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat pendidikan responden berhubungan secara signifikan dengan kemampuan membayar iuran BPJS kelas 3, dimana masyarakat yang tamat SMA lebih mampu membayar dibandingkan dengan masyarakat yang tidak tamat SMA. Penghasilan responden tidak menunjukkan korelasi yang tinggi dengan kemampuan atau kemauan membayar iuran BPJS kelas 3. Pedagang dengan pendapatan di bawah upah minimum Kota Medan menunjukkan kapasitas dan motivasi yang lebih tinggi untuk membiayai iuran BPJS kelas 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Kusuma, A. R., & Siregar, K. P. A. (2021). Analisis Kemampuan dan Kemauan Pasien PBPU Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. *Window of Health*, 4(3), 238–247.
- Aisyah, S. (2022). *Hubungan Antara Persepsi Pendapatan, Dan Jarak Tempuh Menuju Tempat Pembayaran Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Di RS X Kab Bogor Tahun 2021*). [Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju]. [http://repository.uima.ac.id/jspui/bitstream/123456789/6665/1/Skripsi Siti Aisah Fix.pdf](http://repository.uima.ac.id/jspui/bitstream/123456789/6665/1/Skripsi%20Siti%20Aisah%20Fix.pdf)
- Atriyani, R., Ahmad, L. O., & Harun, H. (2019). Faktor Yang Berhubungan dengan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Pasien Rawat Jalan Poli Interna RSUD Kota Kendari Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Celebes*, 1(3), 12–17. <http://jkmc.or.id/ojs/index.php/jkmc>
- Basaza, R., Kyasiimire, E. P., Namyalo, P. K., Kawooya, A., Nnamulondo, P., & Alier, K. P. (2019). Willingness To Pay For Community Health Insurance Among Taxi Drivers in Kampala City, Uganda: A Contingent Evaluation. *Risk Management and Healthcare Policy*, 12, 133–143. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S184872>
- Darmawati, E., & Prakoso, A. D. (2023). Ability To Pay Dan Willingness To Pay Peserta Mandiri Terhadap Penentuan Kelas Iuran Jkn Di Kabupaten Bekasi. *Cakrawala Medika: Journal of Health Sciences*, 1(1), 56–64. <https://doi.org/10.59981/9r457103>
- Dewiyani, A. C., Fadila, R., & Ardhiasti, A. (2022). Ability Dan Willingness To Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pekerja Informal Di Kota Malang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.470>
- Dinkes, Pemko Medan (2023). Sudah 2.449.259 Jiwa Warga Medan Tercover JKN 2024, Optimis Target 98% UHC Tercapai. *Pemerintah Kota Medan*.
- Disnaker. (2023). Press Release UMP Dan UMK Sumatera Utara Tahun 2024. *Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera*



- Utara.
<https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/press-release-ump-dan-umk-sumatera-utara-tahun-2024>
- DJSN. (2024). Aspek Kepesertaan JKN 2024. *Dewan Jaminan Sosial Nasional Sistem Monitoring Terpadu*.
- Fardiansyah, A., Yuniarti, A. M., & Agnestri, P. (2021). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. *Hospital Majapahit*, 13(2), 92–103.
<https://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/HM/article/view/736/745>
- Hardy, I. P. D. K., & Yudha, N. L. G. A. N. (2018). Kemauan Dan Kemampuan Membayar (Ability - Willingness To Pay) Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Denpasar 2017. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 2(2), 96–100.
<https://doi.org/10.36002/jkt.v2i2.541>
- Istamayu, A. A., Solida, A., & Wardiah, R. (2022). *Determinan Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kota Jambi Tahun 2021* [UNJA].
<https://repository.unja.ac.id/35735/>
- LPKK. (2022). Laporan Pengelolaan Program Tahun 2022 & Laporan Keuangan Tahun 2022 (Auditan). *BPJS Kesehatan*.
- Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Darmawansyah, D., Arifin, M. A., Rahmadani, S., & Fajrin, M. Al. (2019). Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPB yang Menunggak Iuran JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 5(2), 102.
<https://doi.org/10.29241/jmk.v5i2.158>
- Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPB pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 13.
<https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.548>
- Ogundeji, Y. K., Akomolafe, B., Ohiri, K., & Butawa, N. N. (2019). Factors influencing willingness and ability to pay for social health insurance in Nigeria. *PLoS ONE*, 14(8), 1–10.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220558>
- Rusydi, A. R., Nurgahayu, & Masri, N. F. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP Dan WTP Dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri. *Window of Public Health Journal*, 3(4), 750–760.
- Sartika, V., & Putra, Z. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Terhadap Pembayaran Iuran JKN di Aceh Selatan. *Journal Of Global and Multidisciplinary*, 2(3), 1420–1433.
<https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Sudarman, Batara, A. S., & Haeruddin, H. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 45–57.
<https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i1.1517>



- Surya, N. T., & Kur'aini, S. N. (2022). Pengaruh Pendapatan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kesehatan di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 215–224.
- Syakhila, I., Nurgahayu, & Sulaeman, U. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP Dan WTP Dengan Penentuan Keputusan Kelas Iuran BPJS Kesehatan. *Window of Public Health Journal*, 01(05), 427–436.
- Wahyuni, N. W. A., & Widodo, S. (2021). Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (PBPU). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 163–171. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i2.52428>